
Demokrasi Indonesia dalam Perspektif Aristoteles dan Huntington: Antara Idealisme dan Realitas Politik

Sri Wahyuni¹, Niken Mutiara², Balqish Adelia³, Farhan Dwirangga⁴, Alfin Fahmi⁵, Revita⁶

^{1, 2, 3, 4, 5, 6}Universitas Negeri Surabaya

Korespondensi: 24040254113@mhs.unesa.ac.id

Article Info

Article history:

Received May 14th, 2026

Revised Jun 29th, 2026

Accepted Jul 22th, 2026

Keyword:

demokrasi; filsafat politik; oligarki;
realitas politik; Indonesia

ABSTRACT

Demokrasi sering dipahami sebagai sistem pemerintahan yang menjunjung kedaulatan rakyat, kesetaraan, dan partisipasi publik. Namun, dalam praktik politik modern, demokrasi tidak selalu berjalan sesuai dengan cita-cita normatif tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketegangan antara idealisme demokrasi dan realitas politik melalui perspektif filosofis pemikiran Aristotle, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Samuel P. Huntington dalam konteks demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis filosofis-komparatif. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan berbagai publikasi akademik yang relevan mengenai teori demokrasi dan perkembangan politik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi mengalami pergeseran dari konsep normatif yang menekankan kebaikan bersama dan partisipasi warga menuju praktik yang lebih pragmatis dan berorientasi pada stabilitas politik. Dalam konteks Indonesia, demokrasi berkembang dalam bentuk hibrida, yakni memadukan mekanisme demokrasi formal dengan praktik politik yang masih dipengaruhi oligarki, kompromi elite, dan lemahnya partisipasi substantif masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa demokrasi bukanlah sistem yang bersifat tetap, melainkan proses politik yang terus berubah sesuai dinamika sosial, budaya, dan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan refleksi kritis dan evaluasi berkelanjutan untuk menjaga kualitas demokrasi agar tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif.



© 2026 The Authors. Published by Edukarya. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber utama kekuasaan negara. Dalam perkembangan pemikiran politik, demokrasi dipahami tidak hanya sebagai mekanisme pemilihan umum, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin kebebasan, partisipasi, persamaan hak, serta perlindungan terhadap kepentingan publik. Aristotle memandang demokrasi sebagai bagian dari kehidupan politik yang harus diarahkan pada terciptanya *common good* atau kebaikan bersama melalui kebajikan warga negara. Sementara itu, John Locke menekankan pentingnya persetujuan rakyat dan perlindungan hak individu dalam pemerintahan, sedangkan Jean-Jacques Rousseau menempatkan kehendak umum (*general will*) sebagai dasar legitimasi politik. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa demokrasi sejak awal dibangun di atas idealisme moral dan partisipasi warga negara dalam kehidupan publik (Held, 2006).

Namun, perkembangan demokrasi modern menunjukkan adanya jarak antara nilai-nilai ideal demokrasi dengan praktik politik yang berlangsung dalam kehidupan nyata. Demokrasi kontemporer sering kali diwarnai oleh dominasi elite politik, kepentingan ekonomi, serta lemahnya partisipasi publik yang substantif. Dalam perspektif modern, Samuel P. Huntington menegaskan bahwa stabilitas politik dan pelembagaan politik menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi, bahkan sering kali lebih diprioritaskan dibanding partisipasi politik yang luas (Huntington, 1968). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip normatifnya, melainkan mengalami transformasi menjadi sistem yang lebih prosedural dan pragmatis.

Dalam konteks global, berbagai penelitian menunjukkan adanya fenomena *democratic backsliding* atau kemunduran demokrasi di banyak negara berkembang maupun negara demokrasi mapan. Demokrasi secara formal tetap berjalan melalui pemilu dan keberadaan institusi politik, tetapi kualitas demokrasi substantif mengalami penurunan akibat meningkatnya populisme, oligarki, serta

melemahnya akuntabilitas politik (Bermeo, 2016). Fenomena ini juga terjadi di Indonesia pasca-Reformasi 1998. Meskipun Indonesia berhasil membangun sistem demokrasi elektoral yang lebih terbuka melalui pemilihan umum langsung dan kebebasan sipil, berbagai studi menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi persoalan serius seperti politik transaksional, dominasi oligarki, polarisasi politik, dan lemahnya kualitas representasi publik (Mietzner, 2020).

Kajian mengenai demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan elite politik dan oligarki ekonomi masih memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan politik. Menurut Winters (2011), oligarki di Indonesia tetap bertahan bahkan setelah transisi demokrasi berlangsung, sehingga demokrasi cenderung hanya bersifat prosedural tanpa perubahan signifikan terhadap distribusi kekuasaan. Selain itu, Aspinall dan Berenschot (2019) menjelaskan bahwa praktik klientelisme dan patronase politik masih menjadi karakter kuat dalam demokrasi Indonesia, terutama dalam kontestasi elektoral. Akibatnya, partisipasi masyarakat sering kali hanya terbatas pada pemilu, sementara keterlibatan substantif warga negara dalam proses pengawasan dan pengambilan kebijakan masih relatif rendah.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara demokrasi sebagai cita-cita filosofis dengan demokrasi sebagai realitas politik. Dalam praktiknya, demokrasi tidak selalu mampu merealisasikan prinsip kesetaraan, kebebasan, dan kedaulatan rakyat secara penuh karena dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, budaya, dan relasi kekuasaan. Oleh karena itu, pendekatan filosofis menjadi penting untuk memahami bagaimana demokrasi berkembang dan mengalami perubahan dari masa ke masa. Analisis filosofis memungkinkan demokrasi dipahami tidak hanya sebagai sistem politik formal, tetapi juga sebagai arena negosiasi antara idealisme normatif dan pragmatisme politik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketegangan antara idealisme demokrasi dan realitas politik melalui pemikiran Aristoteles, Locke, Rousseau, dan Huntington serta menghubungkannya dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian filsafat politik dan demokrasi dengan menghadirkan perspektif integratif antara teori demokrasi klasik dan dinamika politik kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menunjukkan bahwa demokrasi merupakan proses politik yang dinamis dan terus mengalami transformasi sesuai dengan konteks sejarah dan sosial masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman dan analisis mendalam mengenai konsep demokrasi sebagai gagasan filosofis sekaligus realitas politik dalam konteks kehidupan demokrasi di Indonesia. Penelitian kepustakaan digunakan untuk mengkaji berbagai pemikiran filsafat politik serta perkembangan demokrasi kontemporer melalui sumber-sumber akademik yang relevan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis dengan pendekatan filosofis-komparatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep demokrasi menurut pemikiran Aristoteles, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Samuel P. Huntington. Sementara itu, metode analitis digunakan untuk menelaah hubungan antara idealisme demokrasi dengan praktik politik modern yang berkembang di Indonesia. Pendekatan filosofis-komparatif dilakukan dengan membandingkan pemikiran para tokoh mengenai demokrasi serta mengaitkannya dengan kondisi demokrasi Indonesia pasca-Reformasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya utama tokoh filsafat politik yang membahas demokrasi, legitimasi kekuasaan, partisipasi politik, dan hubungan negara dengan warga negara. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas perkembangan demokrasi modern, demokrasi Indonesia, oligarki politik, klientelisme, serta fenomena *democratic backsliding*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas akademik, dan keterbaruan kajian sehingga mampu mendukung analisis penelitian secara komprehensif. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan.

Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi sumber-sumber yang berkaitan langsung dengan konsep demokrasi dan perkembangan politik Indonesia. Selanjutnya, data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama seperti demokrasi normatif, demokrasi prosedural, oligarki, partisipasi politik, dan stabilitas politik. Tahap interpretasi dilakukan dengan menghubungkan pemikiran filosofis para tokoh dengan realitas demokrasi kontemporer di Indonesia untuk menemukan bentuk ketegangan antara idealisme demokrasi dan praktik politik. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan secara sistematis mengenai dinamika demokrasi sebagai sistem politik yang terus mengalami perubahan sesuai dengan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami ketegangan antara idealisme demokrasi sebagai konsep normatif dengan realitas politik yang berkembang secara pragmatis. Demokrasi secara ideal dipahami sebagai sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi melalui partisipasi, kesetaraan, dan orientasi pada kepentingan bersama. Namun, dalam praktiknya demokrasi di Indonesia menunjukkan adanya dominasi elite politik, oligarki ekonomi, serta kecenderungan demokrasi prosedural yang lebih menekankan stabilitas politik dibanding partisipasi substantif masyarakat.

Berdasarkan perspektif Aristoteles, demokrasi ideal diarahkan pada terciptanya *common good* atau kebaikan bersama melalui partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik. Pandangan ini diperkuat oleh pemikiran Locke dan Rousseau yang menekankan pentingnya persetujuan rakyat, perlindungan hak individu, dan kehendak umum sebagai dasar legitimasi kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut tampak melalui keberadaan pemilu langsung, kebebasan sipil, dan terbentuknya berbagai institusi demokrasi pasca-Reformasi 1998. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami perkembangan demokrasi secara formal dan institusional.

Namun demikian, hasil analisis memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya mencapai demokrasi substantif. Demokrasi masih dipengaruhi oleh praktik oligarki, klientelisme, patronase politik, dan dominasi elite dalam pengambilan keputusan politik. Winters (2011) menjelaskan bahwa oligarki di Indonesia tetap bertahan meskipun sistem politik telah mengalami demokratisasi. Hal ini menyebabkan distribusi kekuasaan dan akses politik masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Selain itu, Aspinall dan Berenschot (2019) menjelaskan bahwa praktik klientelisme masih menjadi bagian kuat dalam kontestasi politik Indonesia, terutama dalam proses elektoral.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat cenderung bersifat prosedural dan terbatas pada pemilu. Keterlibatan publik dalam pengawasan kebijakan dan proses demokrasi substantif masih relatif rendah. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya pergeseran demokrasi dari konsep normatif menuju praktik politik pragmatis sebagaimana dijelaskan Samuel P. Huntington. Huntington menekankan bahwa stabilitas politik dan pelembagaan institusi lebih diprioritaskan dibanding partisipasi politik yang luas karena dianggap mampu menjaga keteraturan sistem politik. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini tampak pada kuatnya kompromi elite dan orientasi terhadap stabilitas pemerintahan.

Kondisi demokrasi Indonesia juga menunjukkan adanya fenomena *democratic backsliding* atau kemunduran kualitas demokrasi. Bermeo (2016) menjelaskan bahwa kemunduran demokrasi modern tidak selalu terjadi melalui kudeta atau penghapusan institusi demokrasi, tetapi melalui pelemahan kualitas demokrasi secara bertahap. Hal ini terlihat dari meningkatnya polarisasi politik, lemahnya akuntabilitas publik, serta menguatnya kepentingan elite dalam proses politik di Indonesia. Mietzner (2020) juga menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia mengalami stagnasi akibat resistensi elite anti-reformasi meskipun masyarakat sipil masih tetap bertahan sebagai kekuatan demokratis.

Berdasarkan peta konsep penelitian, demokrasi dipahami melalui dua dimensi utama, yaitu idealisme (normatif) dan realitas (empiris). Pada dimensi idealisme, demokrasi menekankan kedaulatan rakyat, kesetaraan, partisipasi aktif, dan kebaikan bersama sebagaimana dijelaskan Aristoteles, Locke, dan Rousseau. Sementara itu, pada dimensi realitas, demokrasi berkembang menjadi sistem yang lebih pragmatis melalui stabilitas politik, kepentingan elite, kontrol institusi, dan negosiasi kekuasaan sebagaimana dikemukakan Huntington. Kedua dimensi tersebut kemudian bertemu dalam praktik demokrasi Indonesia yang berkembang sebagai sistem hibrida, yaitu perpaduan antara demokrasi formal dengan realitas politik pragmatis.

Hal tersebut juga diperkuat melalui tabel perbandingan idealisme dan realitas demokrasi di Indonesia. Pada dimensi tujuan utama, demokrasi ideal berorientasi pada kepentingan bersama dan kebijakan moral, sedangkan dalam praktiknya demokrasi lebih menekankan stabilitas politik dan kompromi elite. Pada dimensi kedaulatan, demokrasi ideal menempatkan rakyat sebagai sumber utama kekuasaan, tetapi dalam realitas politik kekuasaan sering dipengaruhi oligarki dan kepentingan elite. Pada dimensi partisipasi, demokrasi ideal menghendaki keterlibatan aktif masyarakat secara luas, sedangkan realitas menunjukkan partisipasi yang masih terbatas pada pemilu prosedural. Sementara itu, pada dimensi mekanisme, demokrasi ideal menekankan tata kelola yang transparan dan etis, tetapi realitas politik menunjukkan adanya kompromi pragmatis dalam proses pengambilan kebijakan.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak dapat dipahami sebagai sistem yang sepenuhnya ideal ataupun sepenuhnya gagal. Demokrasi Indonesia berkembang secara dinamis sebagai sistem hibrida yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan relasi kekuasaan. Oleh karena itu, penguatan demokrasi substantif menjadi penting melalui peningkatan pendidikan politik, penguatan partisipasi publik, penegakan hukum yang adil, serta pembatasan dominasi oligarki agar demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1 Perbandingan Idealisme dan Realitas Demokrasi di Indonesia

No	Dimensi	Dimensi Analisis	Realitas
1	Tujuan Utama	Berfokus pada kebaikan bersama dan kebijakan moral (Aristoteles)	Memprioritaskan stabilitas politik dan negosiasi elite.
2	Kedaulatan	Berdasarkan kehendak umum dan persetujuan rakyat (Rousseau/Locke).	Dipengaruhi oleh kekuatan oligarki dan kolusi elite.
3	Partisipasi	Keterlibatan warga negara secara aktif dan kesetaraan.	Terbatas pada pemilu prosedural dengan akuntabilitas yang melemah.
4	Mekanisme	Tata kelola yang transparan dan etis.	Kerangka hibrida dengan kompromi pragmatis.



Gambar 1 Demokrasi Indonesia

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, demokrasi di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara idealisme demokrasi dan realitas politik. Secara ideal, demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi melalui partisipasi aktif, kesetaraan, dan orientasi pada kepentingan bersama sebagaimana dijelaskan oleh Aristoteles, Locke, dan Rousseau. Namun, dalam praktiknya

demokrasi di Indonesia masih dipengaruhi oleh oligarki, kompromi elite, politik transaksional, dan lemahnya partisipasi substantif masyarakat.

Meskipun demikian, demokrasi Indonesia tetap mengalami perkembangan pasca-Reformasi melalui pemilu langsung, kebebasan sipil, dan pelembagaan politik yang lebih terbuka. Hal tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia berkembang sebagai sistem yang dinamis dan bersifat hibrida, yaitu perpaduan antara demokrasi formal dan realitas politik pragmatis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan politik, partisipasi masyarakat, dan pengawasan terhadap kekuasaan agar demokrasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan sosial dan kepentingan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, Y. D., Riadi, K. A., Inayasha, I., Sari, D. O., Gulo, S. S., Sari, P. D., et al. (2025). Oligarki dan kemunduran demokrasi di Indonesia: Analisis tinjauan literatur. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(4), 7661–7671. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/5074>
- Ambarita, Y. D., Sitohang, L. G., & Doris, Y. E. I. (2024). Indonesia's struggle for democratic resilience: Issues and institutional reforms. *International Journal of Law and Society*, 7(4), 219–228. <https://doi.org/10.11648/j.ijls.20240704.16>
- Artaningrum, R. G., Budiarta, I. K., & Wirakusuma, M. G. (2017). Pengaruh profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan dan pergantian manajemen pada audit report lag perusahaan perbankan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(3), 1079–1108.
- Aspinall, E. (2014). Health care and democratization in Indonesia. *Democratization*, 21(5), 803–823. <https://doi.org/10.1080/13510347.2013.873791>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press. <https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9781501732997/democracy-for-sale/>
- Bermeo, N. (2016). On democratic backsliding. *Journal of Democracy*, 27(1), 5–19. <https://doi.org/10.1353/jod.2016.0012>
- Doris, Y. E. I., & Sitohang, L. G. (2023). Demokrasi di tengah konflik kepentingan masyarakat sipil dan pemerintah dalam kasus Wadas-Jawa Tengah: Tinjauan berdasarkan konsep politik demokrasi Jean-Jacques Rousseau. *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, 8(2), 42–51. <https://doi.org/10.37567/jif.v8i2.1193>
- El-Faraby, M. S., Nugroho, D. A. N., Setiyono, S., & Sari, J. N. (2024). Perbandingan konsep demokrasi dalam teori perkembangan filsafat dengan relevansi menjelang Pemilu 2024. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(01), 316–336. <https://doi.org/10.37567/dassollen.v2i01.2721>
- Held, D. (2006). *Models of democracy* (3rd ed.). Polity Press.
- Huntington, S. P. (1968). *Political order in changing societies*. Yale University Press.
- Mietzner, M. (2020). Indonesia's democratic stagnation: Anti-reformist elites and resilient civil society. *Democratization*, 27(6), 1025–1042. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>
- Mietzner, M. (2020). Populist anti-scientism, religious polarization, and institutionalized corruption: How Indonesia's democratic decline shaped its COVID-19 response. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 227–249. <https://doi.org/10.1177/1868103420935561>
- Nurbaity, S., & Fandana, R. (n.d.). *Perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- PolSci Institute. (n.d.). *Rousseau's theory of general will*. <https://polsci.institute/western-political-thought/rousseau-theory-of-general-will/>
- Rivalina, A. F. (n.d.). *Demokrasi dalam sorotan Pancasila di era globalisasi: Antara idealisme dan realitas politik*. Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret.

Universitas Gadjah Mada. (2024). *Melanggengkan oligarki elite partai, akademisi UGM soroti kemunduran demokrasi RI*. <https://ugm.ac.id/id/berita/melanggengkan-oligarki-elite-partai-akademisi-ugm-soroti-kemunduran-demokrasi-ri/>

Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.
<https://www.cambridge.org/core/books/oligarchy/5CC556B4483F7F3FDE1CADF928C04671>